



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 180/SEK/OT.01.2/1/2019 Jakarta, 31 Januari 2019
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya
Keluaran Penyelesaian Perkara Tahun Anggaran 2018

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Para Ketua Pengadilan Negeri.
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, dan demi efektivitas pengelolaan dan penyerapan anggaran Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dibutuhkan evaluasi atas penyerapan anggaran SBK Tahun Anggaran 2018 maka dengan ini meminta agar Bapak/Ibu menginstruksikan jajarannya untuk segera mengisi Formulir Monitoring dan Evaluasi SBK yang terlampir pada laman Pengumuman Mahkamah Agung sesuai dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018. Formulir dimaksud merupakan pemuktahiran formulir sebelumnya yang telah disampaikan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1360/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Penyampaian Alat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Standar Biaya Keluaran (SBK). Mengingat pentingnya kevalidan data tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pusat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian data dilakukan langsung melalui komputer pada aplikasi *Microsoft Office* format *Excel* terlampir; dan
2. Membaca dengan seksama petunjuk pengisian pada *sheet excel* untuk menghindari kesalahan input data.

Diharapkan agar formulir yang telah terisi segera dikirimkan dalam format Excel ke alamat email evlapsbk@gmail.com dan monevsbk@gmail.com selambat-lambatnya pada tanggal **8 Februari 2019**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.